

**Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan  
atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2021  
dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2021**

Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat (BPK NTB) menyerahkan **Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2021** pada hari Jumat, 20 Mei 2022, di Ruang Sidang Paripurna DPRD Provinsi NTB. LHP tersebut diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi NTB, **Ade Iwan Ruswana** kepada Ketua DPRD Provinsi NTB, **Baiq Isvie Rupaeda**, dan Gubernur Provinsi NTB **Zulkieflimansyah**.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2021, maka BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**. Dengan demikian, Pemerintah Provinsi NTB telah berhasil mendapatkan dan mempertahankan Opini WTP untuk kesebelas kalinya (2011-2021). Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta jajaran OPD-nya terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Dan tentu tidak terlepas dari sinergi yang efektif terhadap seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

BPK menyampaikan LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2021 yang terdiri dari 2 buku, yaitu LHP atas Laporan Keuangan (Buku I) dan LHP atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan (Buku II).

Selain melaksanakan pemeriksaan atas **Laporan Keuangan**, BPK juga melaksanakan **Pemeriksaan Kinerja Atas Upaya Pemerintah Daerah Untuk Menanggulangi Kemiskinan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021**, dimana LHPnya berupa *Long Form Audit Report (LFAR)*. Pemeriksaan Kinerja ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemeriksaan LKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 yang dilaksanakan dalam upaya memberikan nilai tambah dan manfaat kepada masyarakat atas Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD yang diterbitkan BPK, sehingga diharapkan pemerintah tidak hanya akan mengejar opini WTP terkait penyajian laporan keuangan, tetapi juga akan terdorong untuk mengelola sumber daya yang ada semaksimal mungkin.

## **PRESS RELEASE**

Kepala Perwakilan BPK NTB juga menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2021 kepada Ketua DPRD dan Gubernur Provinsi NTB. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) tersebut berisi ringkasan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi NTB selama tahun 2021.

Mataram, 20 Mei 2022

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**  
Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat

